

IMPLEMENTASI
MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM GUGUS SEKOLAH

(Studi Kasus di Gugus Sekolah RA Kartini Kecamatan Girimarto)

Tesis

Diajukan kepada :

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Pendidikan



Oleh

Nama	:	Tunggal Widodo BS
NIM	:	Q 100 020 051
Konsentrasi	:	Manajemen Sistem Pendidikan
Program Studi	:	Magister Manajemen Pendidikan

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2006

NOTA PEMBIMBING

Prof. DR. BAMBANG SETIAJI, M.Si

Dosen Program Magister Manajemen Pendidikan
Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal : Tesis Saudara Tunggal Widodo Budi Santoso

Kepada Yth.
Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Tesis Saudara :

Nama	: Tunggal Widodo Budi Santoso
NIM	: Q 100 020 051
Program Studi	: Magister Manajemen Pendidikan
Konsentrasi	: Manajemen Sistem Pendidikan
Judul	: Implementasi Manajemen Pelaksanaan Program Gugus Sekolah (Studi Kasus di Gugus Sekolah RA Kartini Kecamatan Girimarto)

Dengan ini kami menilai Tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tesis pada program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 Agustus 2006

Pembimbing

Prof. DR. BAMBANG SETIAJI, M.Si

NOTA PEMBIMBING

DR. YETTY SARJONO, M.Si

Dosen Program Magister Manajemen Pendidikan
Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal : Tesis Saudara Tunggal Widodo Budi Santoso

Kepada Yth.
Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Tesis Saudara :

Nama	: Tunggal Widodo Budi Santoso
NIM	: Q 100 020 051
Program Studi	: Magister Manajemen Pendidikan
Konsentrasi	: Manajemen Sistem Pendidikan
Judul	: Implementasi Manajemen Pelaksanaan Program Gugus Sekolah (Studi Kasus di Gugus Sekolah RA Kartini Kecamatan Girimarto)

Dengan ini kami menilai Tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tesis pada program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 Agustus 2006

Pembimbing

DR. YETTY SARJONO, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terjadi perubahan mendasar yaitu dari Sentralistik menjadi Desentralistik (otonomi daerah).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah diikuti pula otonomi di bidang Pendidikan.

Otonomi Pendidikan dalam pelaksanaannya segala urusan Pendidikan merupakan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota. Penyerahan kewenangan itu dikandung maksud memberikan wewenang yang begitu luas dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten / kota sehingga mampu mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap kabupaten / kota.

Dengan kata lain otonomi / desentralisasi Pendidikan diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya di bidang Pendidikan, dengan tetap mengacu kepada tujuan Pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam pengertian ini desentralisasi, pendidikan

akan mendorong terciptanya kemandirian dan rasa percaya yang tinggi pemerintah daerah yang pada gilirannya mereka akan berlomba meningkatkan pelayanan Pendidikan bagi masyarakat di daerahnya sendiri. Persaingan yang sehat dan kerja sama antar daerah diharapkan akan terus tumbuh dalam suasana keterbukaan komunikasi antar daerah yang dijiwai semangat persatuan dan kesatuan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang bercirikan keragaman daerah. Sementara itu, pemerintah pusat memainkan peranan yang sangat menentukan untuk memberikan pertimbangan kepada daerah yang memiliki sumber daya terbatas. Dengan mekanisme penyelenggaraan Pendidikan yang demikian, pelayanan Pendidikan diharapkan lebih efisien dan efektif karena daerah tidak tergantung atau menunggu kebijakan pusat untuk keperluan daerahnya (Supriyadi, D, 2001 : 125).

Peranan Pendidikan sangat strategis dalam pembangunan bangsa (Nation Building). Memasuki millennium III sebagai awal era globalisasi dituntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Menghadapi tantangan perubahan sosial yang semakin cepat, pendidikan masa depan perlu sejak dini melatih peserta didik untuk mampu belajar secara mandiri dengan memupuk sikap gemar membaca dan mencari, serta memanfaatkan sumber informasi yang diperlukan untuk dapat menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya (Sudarminta, J, 2000 : 6)

Demikian pula disampaikan oleh Paulo Freire dalam William A Smith (2001 : 117) bahwa salah satu tujuan Pendidikan adalah keadilan. Keadilan

berasal dari fakta bahwa fase-fase perkembangan merupakan sebuah ukuran universal untuk menilai eksistensi manusia, karena keadilan berasal dari proses dialogis yang melahirkan pertumbuhan. Konsekuensinya keadilan itu mendorong pertumbuhan menuju aktualisasi diri, integrasi hasil proses.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam BAB II pasal 3 disebutkan bahwa :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mencapai fungsi dan tujuan Pendidikan dimaksud peran guru tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan pendidikan. Dan guru merupakan aparatur terdepan dalam pencapaian tujuan pendidikan.

Dalam penyelenggaraan jenjang pendidikan di tingkat dasar (SD) peran guru SD sebagai ujung tombak penyiapan sumber daya manusia yang paling dasar. Ujung tombak yaitu barisan kerja kerja yang paling depan dalam penyelenggaraan sekolah atau perguruan (Mastuhu, 2004 : 163)

Disamping itu guru merupakan pekerjaan Soft Profession yang untuk melaksanakan pekerjaan tersebut memerlukan sentuhan art dan sense (Zamroni dalam Suyanto, 2001 : 130)

Oleh karena strategis dan urgennya peran guru SD Direktorat Pendidikan Dasar berupaya melakukan berbagai usaha peningkatan mutu personil atau peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola

pendidikan. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar khususnya di Sekolah Dasar, usaha konkrit yang dilaksanakan antara lain pembentukan wadah gugus dan Sistem Pembinaan Profesional (SPP) guru dan tenaga kependidikan lainnya, dalam upaya peningkatan mutu tenaga kependidikan dan akhirnya dalam upaya peningkatan mutu proses belajar mengajar (Depdikbud, 1996/1997 : 1).

Dalam pelaksanaannya di lapangan pembentukan gugus dimaksud meliputi komponen-komponen yang terdiri dari : komponen kelembagaan meliputi SD Inti dan SD Imbas termasuk di dalamnya Pusat Kegiatan Guru (PKG) dan komponen / wadah pembinaan profesional yang terdiri dari Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS). Baik KKG maupun KKKS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diselenggarakan di Pusat Kegiatan Guru (PKG). Kelompok kerja ini berfungsi sebagai wadah pembinaan profesional baik bagi guru maupun kepala sekolah.

Gugus dan Pusat Kegiatan Guru (PKG) sebagai lembaga / organisasi dimana Sistem Pembinaan Profesional (SPP) dilaksanakan perlu dikelola dengan baik dan dikembangkan terus pertumbuhannya, sehingga berfungsi secara efektif. Hal ini perlu ditempuh karena kondisi tenaga kependidikan di sekolah dasar saat ini masih memerlukan upaya pembinaan dan peningkatan melalui pemberian bantuan profesional seiring dengan lajunya perkembangan dan kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi gugus sekolah dasar yang ada di wilayah kecamatan memiliki tujuan serta semangat untuk maju bersama dalam menghasilkan mutu pendidikan (Depdikbud, 1996/1997 : 2).

Pembentukan gugus dimaksudkan untuk dapat memperlancar upaya peningkatan mutu pengetahuan, wawasan, kemampuan dan keterampilan profesionalisme guru, dalam hal ini khusus guru sekolah dasar, dalam meningkatkan mutu kegiatan proses belajar mengajar dengan mendayagunakan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh sekolah yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu hasil belajar.

Penelitian ini akan mengambil gugus sekolah RA Kartini di Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, dengan pertimbangan dan alasan bahwa pada tahun 2003 gugus dimaksud mendapatkan juara 1 lomba gugus tingkat Kabupaten Wonogiri dan juara I lomba gugus tingkat Karesidenan Surakarta. Dalam kegiatan ini aspek materi penilaian meliputi Manajemen Kegiatan Belajar Mengajar, Sarana Prasarana, dan Peran serta Masyarakat.

Dari beberapa hal yang telah diperoleh oleh gugus RA Kartini Kecamatan Girimarto dalam pelaksanaan kegiatannya menunjukkan bahwa sistem pembinaan profesional guru sekolah dasar yang dilaksanakan berjalan cukup efektif dan peran serta masyarakat di sekitar dalam mendukung kegiatan gugus menunjukkan nilai partisipasi yang cukup membanggakan. Hal ini terbukti dukungan dana yang diberikan untuk pembenahan dan pengadaan fasilitas sekolah sangat tinggi. Kondisi demikian peran serta masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap pendidikan telah mampu memberikan nilai plus bagi gugus RA Kartini.

Sehingga hal inilah yang menarik untuk peneliti akan ungkapkan mengenai Implementasi Manajemen Pelaksanaan Program Gugus RA Kartini Kecamatan Girimarto.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka focus penelitian ini adalah bagaimanakah manajemen Pelaksanaan Program gugus sekolah sebagai system Pembinaan Profesional Guru di gugus RA Kartini Kecamatan Girimarto.

Dengan demikian focus penelitian dapat diuraikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen Pelaksanaan Program gugus RA Kartini di Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri.
2. Mengapa pelaksanaan kegiatan gugus sekolah sebagai wadah pembinaan professional guru sangat penting
3. Adakah factor pendorong dan penghambat pelaksanaan manajemen gugus RA Kartini

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk :

1. Menganalisis manajemen pelaksanaan Program gugus sekolah yang merupakan sekelompok atau gabungan SD yang memiliki tujuan semangat maju bersama dalam meningkatkan mutu Pendidikan melalui sistem

pembinaan profesional, hal ini pelaksanaannya perlu diteliti Manajemen Pelaksanaan Program gugus RA Kartini di Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri.

2. Menganalisis pentingnya peran gugus sekolah RA Kartini dalam meningkatkan pembinaan profesional guru.
3. Mengidentifikasi Faktor pendorong dan penghambat serta akibatnya terhadap perkembangan manajemen gugus RA Kartini

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang Implementasi Manajemen Pelaksanaan Program Gugus Sekolah RA Kartini Kecamatan Girimarto diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi kepentingan pendidikan :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memberikan bahan bagi pengembangan ilmu tentang sistem pembinaan profesional guru.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan untuk :
 - a. Bahan acuan bagi peningkatan pelaksanaan program kegiatan gugus sekolah.
 - b. Membantu kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program kegiatan gugus sekolah
 - c. Memeberikan masukan yang berguna dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat terhadap sistem pembinaan profesional guru melalui gugus sekolah.

- d. Mengungkapkan secara nyata tentang pelaksanaan program kegiatan gugus sekolah yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai wadah pembinaan profesional guru secara optimal.